

**FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
2. Tugas : Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Fungsi :
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di intelijen keamanan dan bimbingan masyarakat;
 - d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara;
 - e. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa;
 - f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik dan kontijensi;
 - g. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan pengamanan obyek vital nasional dan transportasi;
 - h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - i. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
4. Indikator Kinerja Utama Eselon I

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja utama	Penjelasan	Eselon I
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Capaian hasil sesuai Dokumen Perencanaan (1,2,3,4,5) / 5 • Tipe Penghitungan : Kumulatif 	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

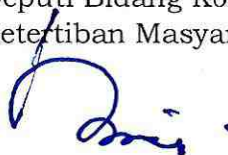
	Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : <ol style="list-style-type: none"> 1. BNPT 2. BNPT 3. Kemendagri 4. BNN 5. Polri 	
		2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Persentase capaian rekomendasi kebijakan Bidang Kamtibmas sesuai Dokumen Perencanaan • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputan Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional 	
		3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Persentase capaian rekomendasi kebijakan Bidang Kamtibmas yang ditindaklanjuti • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputan Bidkooor Kamtibmas yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait 	
2.	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Capaian penyelesaian 	

			<p>tugas khusus / perintah tugas khusus X 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber Data : Laporan Pelaksanaan Tugas Khusus 	
3.	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	<p>1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kategori Penilaian : <ul style="list-style-type: none"> 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30) • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Inspektorat Kemenko Polhukam 	
		<p>2. Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek 8 area perubahan. Skala nilai 0 – 23,5 • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Deputi Bidkooor Kamtibmas 	
		<p>3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu 	

			<p>b. 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja 	
		<p>4. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Indeks pada pelayanan program dan evaluasi + indeks pada pelayanan tata usaha dan umum / 2 • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber Data : Hasil survey kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Kantibmas kepada stakeholders dan Pejabat di Kedeputian Bidkooor Kantibmas 	

Jakarta, 8 Januari 2020

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



Carlo Tewu